



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SABTU, 16 FEBRUARI 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kejati Usut Dugaan Korupsi SDA

BENGKULU - Kejaksaan Tinggi Bengkulu dibackup Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi sumber daya alam (SDA). Infonya juga sudah ada perusahaan perkebunan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Aspidus Kejati Bengkulu, Henry Nainggolan tidak menampikinya. Hanya saja menurutnya masih ditangani Bidang Intel Kejati. "Masih di Intel ok," kata Henry melalui pesan WhatsApp (WA), tadi malam.

Salah seorang sumber RB di Kajati Bengkulu menyebutkan, penanganan dugaan korupsi SDA ini memang sudah menjadi atensi dari Jampidsus Kejagung untuk seluruh Kejaksaan Tinggi. Karena salah satu daerah rawan korupsi itu ada dari SDA. Seperti pemberian surat izin usaha pertambangan/perkebunan (SIUP) pada perusahaan perkebunan atau pertambangan. Namun SIUP itu masuk dalam kawasan konservasi atau hutan lindung.

▶ Baca KEJATI..Hal 7

Sambungan dari halaman 1

Mengapa bisa terbit, kemungkinan ada indikasi suap dalam penerbitan itu. Khusus pertambangan batu bara, setiap ton yang diproduksi harus membayar retribusi. Harus diselidiki apakah jumlah produksi batu bara sesuai dengan data retribusi yang masuk. Kalau berbeda tentu ada indikasi penggelapan pendapatan untuk negara. "Di Medan sudah ada yang terungkap. Kalau di Bengkulu kebetulan belum ada yang naik," kata sumber RB ini, kemarin sore.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Bengkulu sudah mempermasalahkan terjadinya dugaan korupsi sumber daya alam (SDA) yang ada di Bengkulu. Direktur Walhi Provinsi Bengkulu Beni Ardiansyah menyebutkan salah satu jenis korupsi SDA adalah soal pajak, ada indikasi perusahaan yang diberikan izin hak guna usaha (HGU) menganulir pajak. Kemudian juga ada indikasi belum jelasnya dana reklamasi, dana pajak tanah atau Lamren.

Dana-dana yang seharusnya dibayar oleh perusahaan perkebunan maupun perusahaan tambang tersebut, saat ini belum jelas apakah sudah dibayarkan. Karena belum ada keterbukaan informasi terkait dengan masalah ini. "Seharusnya, maksud saya, pascakedatangan Presiden di Bengkulu ini momentum kalau ada perbaikan tata kelola SDA di Bengkulu. Dalam hal ini saya tidak melihat itu sekarang," kata Direktur Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah, kemarin.

Dia menjelaskan, untuk pajak tanah itu hitungannya luasan izin yang diberikan dikalikan dengan 5 USD. Jika luas konsesi atau izin HGU yang mereka miliki 10 ribu hektare maka dikalikan 5 USD. Perusahaan harus membayar itu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pernah perusahaan membayar atau tidak. "Ini yang tidak pernah terekam," katanya.

Dijelaskannya, Walhi sudah pernah bersurat dan mendiskusikan hal ini dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Soal transaksi-transaksi kejahatan



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SABTU, 16 FEBRUARI 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kejati Usut Dugaan Korupsi SDA

**DAFTAR PERUSAHAAN TAMBANG DIDUGA
DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN KONSERVASI**

1. PT KRU, Bengkulu Tengah dengan luas konsesi 984,60 ha diduga masuk kawasan 950,36 ha, di kawasan HP Semidang Bukit Kabu dan TB Semidang Bukit Kabu, tahap kegiatan operasi produksi.
2. PT KG, Bengkulu Utara luas konsesi 921 hektare diduga masuk kawasan hutan 0,0599 hektare di TWA Sebelat tahap kegiatan operasi produksi.
3. PT BMQ Bengkulu Tengah luas konsesi 2.000 hektare diduga masuk kawasan hutan 681,89 hektare di HPT dan HL Bukit Daun Reg.5 tahap kegiatan operasi produksi.
4. PT CBS Bengkulu Tengah luas konsesi seluas 984,60 hektare diduga masuk kawasan hutan 1,67 hektare di HL Bukit Daun Reg. 5 tahap kegiatan operasi produksi
5. PT RSM Seluma luas konsesi 663,60, diduga masuk ke kawasan hutan seluas 883 di HPT Bukit Berdas reg 76 dan HL Bukit Sanggul tahap kegiatan operasi produksi
6. PT DI Bengkulu Utara luas konsesi 2.900 ha diduga masuk ke kawasan hutan seluas 60,75 ha di hutan Lindung Bukit Dauntahap kegiatan eksplorasi (non C dan C)
7. PT DI, Seluma luas konsesi 5.921,83 hektare diduga masuk kawasan hutan 61,83 hektare di HPT Bukit Bedas, reg 76 dan HL Bukit Sanggul, tahapan kegiatan eksplorasi
8. PT CBP Bengkulu Tengah (5.589,48) diduga masuk kawasan hutan seluas 1.500,39 hektare di HK Taman Buru Semidang Bukit Kabu tahapn kegiatan Eksplorasi.

(SUMBER WALHI)

soal pajak. Kejahatan soal reklamasi pertambangan, seperti masalah reboisasi dan lainnya. Kita mendiskusikan ini, supaya ada penindakan terhadap hal itu. Mengapa ini terjadi karena masih lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum terhadap SDA ini. "Kita sudah laporkan juga, langsung diskusi dengan Polda juga," katanya.

Tindak lanjut dari diskusi itu katanya, saat itu kejati menindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data terhadap informasi yang disampaikan oleh Walhi. Menurut Beni mereka menemukan buruknya sistem informasi di Provinsi Bengkulu terkait dengan data yang diinginkan, ditutupi pemerintah. "Karena jaminan dana reklamasi memang tidak ada laporannya. Ini cenderung didiamkan oleh pemerintah," katanya.

Harus ada gebrakan dari pemda untuk melakukan perbaikan tata kelola SDA di Provinsi Bengkulu. Sehingga bisa dilihat bagaimana persoalan ini harus ditindaklanjuti. "Dalam waktu dekat kita akan bertanya lagi dengan kejakaan seperti apa perkembangannya," terangnya.

Dia menjelaskan Pasca Korsup-

gah KPK 2015 lalu, KPK pernah merilis dana pajak yang diduga tidak dibayarkan dari sektor ini hampir mencapai Rp 130 miliar.

"Kita sudah beberapa kali mengejar pemda provinsi melakukan tindakan ini tidak pernah terjadi. Pemda tidak pernah terbuka atas masalah ini. Cenderung melindungi," terangnya.

Informasinya juga penyidik di Kejagung akan memanggil salah satu perusahaan perkebunan, PTPN VII Rabu ini (20/2) di Kejati Bengkulu. "Rencananya 5 orang tim dari Kejagung akan turun," kata sumber RB di Kejati kemarin.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Bengkulu Martin Luther saat dikonfirmasi tidak membantahnya, tapi tidak juga membenarkannya. "Kasusnya bagaimana itu, saya malah belum tahu karena tidak ada orang lagi di kantor, sudah pada pulang. Nanti Senin saya coba tanya sama jaksa pidsus ya," ujar Martin dihubungi RB pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, pihak PTPN VII belum bisa dikonfirmasi oleh RB. Manager PTPN VII unit Desa Padang Pelawi Kabupaten Seluma, Hendra Putra tidak bisa dihubungi. Via WA tidak dijawab. (del)